

**Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah
dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap
Ketimpangan Pembangunan Wilayah
(Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)
Lukman Harun, Ghozali Maski
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: lukmanharun2003@gmail.com**

ABSTRACT

This research aimed to determine the effect of the Local Government Expenditure and Economic Growth for Inequality of Regional Development in all districts and cities in East Java in the year 2007 to 2011. Inequality of Regional Development as the dependent variable was measured using the measurement method Williamson Index. Based on the purpose of data analysis method used is the method of panel data regression analysis with Random Effects Model approach.

The empirical results of this study indicate that Local Government Expenditure has a significant and negative effect on Inequality of Regional Development and Economic Growth has a positive and significant effect on Inequality of Regional Development.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di seluruh kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2007-2011. Ketimpangan Pembangunan Wilayah sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan metode pengukuran Indeks Williamson. Berdasarkan tujuan tersebut metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model*.

Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah.

Kata kunci : Ketimpangan Pembangunan Wilayah, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan akhir pembangunan ekonomi Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur. Pengertian adil dan makmur sebenarnya relatif, sehingga sukar diberi batas kuantitatif. Namun, demikian jelas bahwa yang dikehendaki masyarakat Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan hasil pertumbuhan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan bukannya hanya golongan kecil masyarakat saja.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Todaro (2000:18) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya bukan merupakan satu-satunya tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi, tetapi pembangunan ekonomi harus pula berupaya untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran atau upaya untuk menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Lebih lanjut menurut Todaro (2000:21-24) keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu: (1) perkembangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya

(*basic needs*), (2) meningkatkan rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Ketiga hal tersebut merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan.

Arsyad (1988:172) menyatakan bahwa penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan pembagian pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Lebih lanjut ketidakmerataan diungkapkan dalam berbagai permasalahan seperti ketidakmerataan kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan untuk memilih, dan lain-lain.

Di negara-negara sedang berkembang, perhatian utama terfokus pada dilema kompleks antara pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Keduanya sama-sama penting, namun hampir selalu sulit diwujudkan bersamaan. Pengutamaan yang satu akan menuntut dikorbankannya yang lain. Pembangunan ekonomi mensyaratkan *Gross National Product* (GNP) yang tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi masalah bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasil-hasilnya. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan kini merupakan masalah pokok dalam pembangunan dan sasaran utama kebijakan pembangunan di banyak negara (Todaro, 2000:177-178).

Ketimpangan wilayah merupakan suatu aspek yang umum terjadi di setiap negara baik negara miskin, negara berkembang, bahkan negara maju sekalipun memiliki masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah walaupun dengan ukuran yang berbeda-beda. Menurut Neo Klasik ketimpangan wilayah ini terjadi karena setiap daerah memiliki perbedaan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu tidak mengherankan apabila ada yang disebut daerah maju dan daerah yang terbelakang.

Myrdal (1976:56) berpendapat, adakalanya daerah-daerah yang maju memiliki dan membina kondisi-kondisi alamiah yang sangat baik bagi pemusatan kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah tersebut, dalam banyak hal mereka melakukannya pada saat mereka hendak memulai memanfaatkan kondisi menguntungkan yang kompetitif. Pusat-pusat perdagangan sudah tentu akan memilih berlokasi di tempat-tempat dimana terdapat kondisi alamiah yang cukup baik bagi pembangunan pelabuhan, dan pusat-pusat industri berat biasanya akan memilih tempat yang tidak terlalu jauh dari sumber batubara dan baja.

Lebih lanjut Myrdal (1976:56) mengatakan, secara umum dapat dikatakan bahwa daya tarik suatu daerah dimulai dari sejarah masa lalu yang bersifat kebetulan : bahwa pada masa lalu pernah ada sesuatu kegiatan ekonomi yang dimulai di daerah itu dan ternyata berhasil, dan tidak dimulai di daerah lain dimana sesuatu kegiatan ekonomi tersebut sebenarnya dapat juga dimulai dan mungkin akan membawa hasil yang lebih baik. Dan dikemudian hari di daerah yang berhasil, bertambahnya keunggulan-keunggulan lain – seperti terlatihnya golongan pekerja dalam berbagai macam keterampilan, mudahnya komunikasi, berkembangnya rasa bertumbuh dan terbukanya kesempatan-kesempatan yang luas, dan semangat membangun perusahaan-perusahaan baru, bertambahnya fasilitas-fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan, jalan dll – yang memperkuat dan menopang pertumbuhan yang terus berlanjut di daerah tersebut.

Di sisi lain daerah-daerah yang tidak mempunyai keunggulan mengalami stagnasi dan bahkan tidak mungkin akan mengalami kemunduran. Berdasarkan asumsi yang sama daerah-daerah miskin, apabila dibiarkan maka mereka tidak akan mampu memiliki fasilitas-fasilitas publik yang baik. Penduduk yang hidup di daerah-daerah seperti ini cenderung memiliki pemikiran yang lebih primitif, mengkeramatkan unsur-unsur kebudayaan tradisional dengan tabu, dan mereka lebih percaya pada kekuatan-keuatan gaib dan pada umumnya kurang rasional. Keseluruhan system pemikiran mereka sedemikian terpatir dengan kemiskinan dan keterbelakangan sehingga mereka menjadi kurang peka terhadap aspirasi-aspirasi eksperimen dari masyarakat dari daerah lain (Myrdal. 1976:60).

Kesimpulan dari kenyataan bahwa apabila kegiatan ekonomi di daerah dibiarkan melalui mekanisme pasar maka akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Dengan tidak adanya campur tangan dari pemerintah maka proses produksi industry, perdagangan, perbankan, asuransi,

perkapalan dan hampir semua kegiatan ekonomi akan menumpuk di tempat-tempat tertentu, sedangkan daerah-daerah lainnya di negara bersangkutan dibiarkan terbelakang. Oleh karena itu diperlukan peran dari pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi di daerah guna mengatasi ketimpangan wilayah.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, proses pembangunan dilaksanakan secara sentralistis. Pemerintah pusat menempatkan dirinya sebagai penggerak utama dalam upaya akselerasi pembangunan diseluruh pelosok tanah air. Berbagai kebijakan pembangunan diputuskan secara terpusat dengan instrumen utamanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sentralisasi berbagai keputusan pada pemerintah pusat semakin memperbesar inefisiensi, karena banyak proyek-proyek yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah.

Studi yang dilakukan Davey (1989) terhadap pemerintahan Indonesia menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan kenapa pemerintah Indonesia cenderung bersifat sentralistik dalam menjalankan proses pembangunannya. Pertama, kekhawatiran mengenai persatuan nasional dan kekhawatiran mengenai kekuatan-kekuatan memecah yang mau tidak mau muncul dari keadaan yang kurang stabil di awal kemerdekaan. Kedua, masalah memelihara keseimbangan politik dan keadilan dalam pembagian sumberdaya antar daerah. Ketiga, pemerintah pusat ingin memegang kendali yang erat atas kebijaksanaan pembangunan ekonomi.

Proses pembangunan yang sentralistik tersebut membuat ketimpangan wilayah yang sangat mencolok antara Kawasan Indonesia Barat dengan Kawasan Indonesia Timur, antara Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa, bahkan di dalam Pulau Jawa sendiri ada ketimpangan wilayah antara Kota dengan Kabupaten, antara Jakarta dengan Luar Jakarta (Sjafrizal. 2008).

Setelah runtuhnya masa Orde Baru, selanjutnya dimulailah masa Otonomi Daerah dimana proses pembangunan menjadi desentralisasi. Otonomi Daerah ditandai dengan dikeluarkannya UU. No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2001. Kedua undang-undang ini kemudian diamandemen menjadi UU No. 32 dan No. 33 tahun 2004.

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat (Sidik, 2002).

Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembangunan ekonomi di daerahnya masing-masing. Pembangunan ekonomi daerah pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Desentralisasi fiskal, merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Arsyad (1999,108) memberikan definisi bahwa perekonomian daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di daerah.

Sesuai dengan tujuan dari pembangunan ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan ketimpangan pembangunan wilayah, maka pemerintah daerah berkewajiban menyelesaikan ketimpangan wilayah tersebut. Masalah ketimpangan pembangunan wilayah tidak dapat diselesaikan pemerintah daerah yang bergerak secara sendiri-sendiri, harus ada koordinasi antar pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan wilayah terjadi.

Menurut Dumairy (1999) peran pemerintah dalam perekonomian dapat dikategorikan dalam empat macam peran yaitu: peran alokasi, peran distribusi, peran stabilisasi, dan peran dinamisasi. Salah satu bentuk peran pemerintah dalam perekonomian adalah kebijakan fiskal, menurut William A. McEachern (2000) pengeluaran pemerintah adalah salah satu dari bentuk kebijakan fiskal. Sejalan dengan pendapat tersebut sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004 pasal 66, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi. Fungsi alokasi dan distribusi yang dimiliki APBD diharuskan dapat mengalokasikan serta mendistribusikan seluruh sumber daya, kesempatan dan hasil ekonomi secara optimal dan adil. Oleh karena itu peran pemerintah dapat dilihat dari pengeluaran APBD.

Pada umumnya pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah karena dapat menciptakan peluang kerja di daerah.

Permasalahan dari pemerintah adalah pertumbuhan daerah yang tinggi biasanya tidak diimbangi dengan pemerataan, seringkali hasil penelitian di Propinsi Jawa Timur menunjukkan pengaruh bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru semakin membuat ketimpangan semakin besar. Namun dari penelitian tersebut belum ada yang melakukan penelitian dengan menggunakan data panel, sehingga dalam penelitian ini mencoba untuk menggunakan data panel. Dengan keistimewaan yang dimiliki data panel kemungkinan akan memberikan hasil yang berbeda.

Provinsi Jawa Timur menjadi penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Lokasi Jawa Timur yang strategis menjadikan provinsi ini sebagai pintu gerbang perdagangan antara Kawasan Tengah, Kawasan Timur dan Kawasan Barat Indonesia. Sehingga Jawa Timur memiliki peluang yang besar dalam pembangunan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diduga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi.

Perekonomian Jawa Timur mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Timur terus mengalami kemajuan. Meskipun perekonomian di Jawa Timur menunjukkan kemajuan, tetapi berdasarkan hasil pendapatan daerah, kemajuan ekonominya tidak diimbangi dengan adanya pemerataan antar wilayah kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Jawa Timur tidak terbebas dari masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa masih ada jarak yang cukup jauh antara PDRB per kapita kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini terlihat dari nilai PDRB per kapita tertinggi pada tahun 2011 diduduki oleh Kota Kediri dengan nilai sebesar Rp. 241,917 Juta. Sedangkan PDRB per kapita terendah hanya sebesar Rp. 6,879 Juta, sangat jauh dari rata-rata provinsi yang sebesar Rp. 24,261 Juta. Hal ini menunjukkan masih belum meratanya distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1 PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur Tahun 2011

(ribu rupiah)

No	Kab/Kota	Jumlah PDRB	No	Kab/Kota	Jumlah PDRB
1	Kota Kediri	Rp. 241.917	21	Kab. Magetan	Rp. 13.268
2	Kota Surabaya	Rp. 84.513	22	Kab. Jombang	Rp. 13.187
3	Kota Malang	Rp. 41.494	23	Kab. Blitar	Rp. 12.276

No	Kab/Kota	Jumlah PDRB	No	Kab/Kota	Jumlah PDRB
4	Kab. Gresik	Rp. 36.646	24	Kab. Jember	Rp. 12.102
5	Kota Madiun	Rp. 33.091	25	Kab. Sumenep	Rp. 12.037
6	Kab. Sidoarjo	Rp. 33.018	26	Kab. Nganjuk	Rp. 12.032
7	Kota Mojokerto	Rp. 26.560	27	Kab. Madiun	Rp. 11.678
8	Kota Probolinggo	Rp. 24.339	28	Kab. Pasuruan	Rp. 11.608
9	Kab. Bojonegoro	Rp. 22.696	29	Kab. Kediri	Rp. 11.590
10	Kab. Mojokerto	Rp. 20.137	30	Kab. Lamongan	Rp. 11.353
11	Kota Batu	Rp. 19.334	31	Kab. Bondowoso	Rp. 10.568
12	Kab. Tuban	Rp. 19.054	32	Kab. Ngawi	Rp. 9.869
13	Kab. Tulungagung	Rp. 18.416	33	Kab. Trenggalek	Rp. 9.800
14	Kota Blitar	Rp. 17.130	34	Kab. Ponorogo	Rp. 9.772
15	Kab. Banyuwangi	Rp. 16.850	35	Kab. Bangkalan	Rp. 9.192
16	Kota Pasuruan	Rp. 15.862	36	Kab. Sampang	Rp. 7.293
17	Kab. Lumajang	Rp. 15.397	37	Kab. Pamekasan	Rp. 7.015
18	Kab. Probolinggo	Rp. 15.205	38	Kab. Pacitan	Rp. 6.879
19	Kab. Malang	Rp. 14.502		JUMLAH	Rp. 921.934
20	Kab. Situbondo	Rp. 14.254		RATA2	Rp. 24.261

Sumber : Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kota di Indonesia 2007-2011. Jakarta

Ketimpangan pembangunan wilayah masih menjadi persoalan yang penting untuk diatasi. Apabila ketimpangan tidak segera diselesaikan, maka masalah ini dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh dari Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah. Pengeluaran Pemerintah Daerah dianggap sebagai bentuk peran dari pemerintah dalam mengatasi masalah Ketimpangan Pembangunan wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai pengujian apakah memberikan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang menggunakan data *time series* dalam meneliti hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Propinsi Jawa Timur.

Pada umumnya penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan wilayah, memberikan kesimpulan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pembangunan wilayah memiliki hubungan *tradeoff*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Atems (2012) di Amerika Serikat pada tahun 2000-2007, Zaman dan Khilji (2012) di Pakistan pada tahun 1964-2011, Martin (1999) di Negara-negara di Eropa pada tahun 1994-1999. Selanjutnya penelitian mengenai hubungan kesenjangan pendapatan dengan kebijakan ekspansi pengeluaran publik oleh Harun, dkk. (2012) di Malaysia pada tahun 2000-2009, memberikan hasil bahwa secara umum ekspansi pengeluaran publik meningkatkan kesenjangan pendapatan.

Penelitian di Indonesia juga banyak dilakukan mengenai ketimpangan pembangunan wilayah antara lain seperti yang dilakukan oleh Sudarmono (2006) di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 1983-2003, yang memberikan kesimpulan bahwa Hipotesis Kuznets berlaku di Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh Sianturi (2011) di Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2004-2008, yang memberikan kesimpulan bahwa Desentralisasi fiskal berpengaruh meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sejalan peningkatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi peningkatan ketimpangan wilayah.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi Regional

Teori pertumbuhan ekonomi regional merupakan bagian penting dalam analisa Ekonomi Regional. Alasannya jelas karena pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama analisa pertumbuhan ekonomi regional ini adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan ada pula yang tumbuh lambat (Sjafrizal. 2008).

Di samping itu, analisa pertumbuhan ekonomi regional ini juga dapat menjelaskan mengapa terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah. Berbeda dengan Teori Pertumbuhan yang terdapat dalam Ekonomi Makro, Teori pertumbuhan Ekonomi Regional ini memasukkan unsur lokasi dan wilayah secara eksplisit sehingga kesimpulan yang dihasilkan juga berbeda.

Model Pertumbuhan Ekonomi Regional

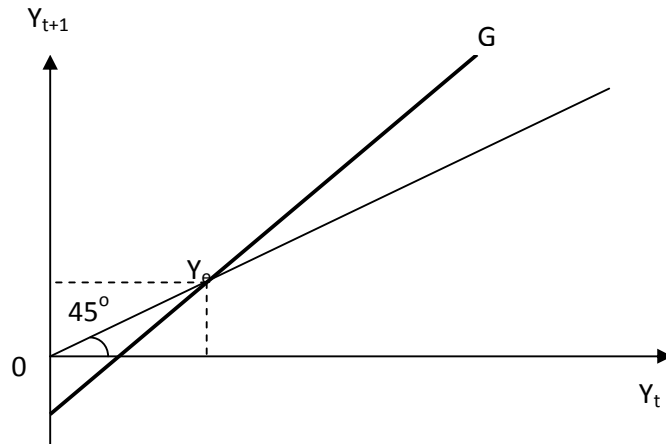
Sjafrizal dalam bukunya menjelaskan, dalam perkembangannya Ilmu Ekonomi Regional sampai saat ini menunjukkan bahwa terdapat 3 model pertumbuhan yang cukup terkenal dan bersifat dominan yaitu *Eksport-Base Model*, *Interegional Income Model*, *Model Neo Klasik*, dan *Cumulative Causation Model*. Masing-masing model menggunakan ide pokok yang tersendiri dan menghasilkan analisa dan kesimpulan tentang faktor penentu pertumbuhan ekonomi regional yang tersendiri pula. Dalam penelitian ini yang dijadikan dasar adalah *Cumulative Causation Model*. Berikut ini diuraikan ide pokok dan formulasi dari *Cumulative Causation Model* pertumbuhan ekonomi regional tersebut.

Model Penyebab Berkumulatif (*Cumulative Causation Model*)

Model Penyebab Berkumulatif (*Cumulative Causation Model*) ini pertama kali dikeluarkan oleh Nikolas Kaldor yang merupakan kritik terhadap Model Neo-Klasik, Model Penyebab Berkumulatif tidak percaya pemerataan pembangunan antar daerah akan dapat dicapai dengan sendirinya berdasarkan mekanisme pasar. Menurut model ini, ketimpangan pembangunan regional hanya akan dapat dikurangi melalui program pemerintah.

Analisa pertumbuhan ekonomi daerah menurut model ini dapat dipresentasikan melalui grafik sebagai berikut :

Grafik 1 Pertumbuhan Penyebab Berkumulatif



Sumber : Sjafrizal (2008)

Kurva G adalah Kurva Pertumbuhan Ekonomi, pada saat Kurva G berpotongan dengan garis bantu 45° pada titik Y_e maka terjadi keseimbangan atau pemerataan pembangunan. Sebelum titik keseimbangan maka pertumbuhan ekonomi daerah tidak berkumulatif maka ketimpangan ekonomi

daerah cenderung mengecil, namun pada saat melewati titik keseimbangan, maka pertumbuhan ekonomi daerah berkumulatif sehingga ketimpangan cenderung melebar.

Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Menurut Neo-Klasik Ketimpangan Pembangunan Wilayah terjadi karena adanya perbedaan sumberdaya, tenaga kerja, dan modal yang dimiliki oleh tiap daerah adalah berbeda-beda. Hipotesa Neo-Klasik merupakan dasar teoritis terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Termasuk dalam hal ini adalah hasil studi dari Jeffrey G. Williamson yang melakukan pengujian terhadap kebenaran Neo-Klasik tersebut. Menurut Neo-Klasik bahwa ketimpangan wilayah akan berkurang dengan sendirinya. Neo-Klasik berpendapat bahwa dalam awal pembangunan yang dilaksanakan di negara yang sedang berkembang justru ketimpangan meningkat, hal ini dikarenakan pada saat proses pembangunan baru dimulai di negara sedang berkembang, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya di dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunan sudah lebih baik. Sedangkan daerah-daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selain faktor ekonomi, faktor sosial-budaya juga turut mempengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah (Myrdal. 1976).

Keberhasilan Hipotesa Neo-Klasik ini kemudian diuji oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan sedang berkembang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik yang diformulasikan secara teoritis ternyata terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan wilayah, tetapi pada tahap awal pembangunan justru terjadi hal yang sebaliknya. Pembuktian hipotesa ini bisa dilihat pada tahap awal pembangunan di Amerika Serikat yang terjadi ketimpangan antara negara-negara bagian selatan yang tertinggal dibandingkan dengan negara-negara bagian utara yang sudah lebih maju.

Pengukuran Ketimpangan Antar Wilayah

Mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu negara atau daerah bukanlah hal yang mudah karena hal ini akan dapat menimbulkan perdebatan yang panjang. Namun pada umumnya metode yang lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah dengan menggunakan metode *Williamson Index*

Ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah yang mula-mula ditemukan adalah *Williamson Index*. Dalam Ilmu Statistik, indeks ini sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah *Williamson Index* muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G. Williamson yang pertama kali menggunakan teknik ini untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Williamson Index menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah. Dengan demikian formulasi Indeks Williamson ini secara statistik dapat ditampilkan sebagai berikut :

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n (y_i - y)^2 (\frac{f_i}{n})}{y^2}} \quad 0 < V_w < 1$$

- dimana y_i = PDRB perkapita daerah i
 y = PDRB perkapita rata-rata seluruh daerah
 f_i = Jumlah Penduduk daerah i
 n = Jumlah Penduduk seluruh daerah.

subskrip w digunakan karena formulasi yang digunakan adalah secara tertimbang sehingga indeks tersebut dapat dibandingkan dengan negara atau daerah lainnya. Sedangkan pengertian indeks ini adalah sebagai berikut : bila V_w mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila V_w mendekati nol berarti sangat merata.

Pengeluaran Pemerintah

Peran Pemerintah dalam perekonomian dapat diklasifikasikan dalam empat macam peran, yaitu : peran alokasi, peran distribusi, peran stabilisasi, dan peran dinamisasi. Peranan pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan fiskal. Menurut McEachern (2000) kebijakan fiskal menggunakan belanja pemerintah, pembayaran transfer, pajak dan pinjaman untuk mempengaruhi variabel makroekonomi seperti tenaga kerja, tingkat harga dan tingkat GDP. Alat kebijakan fiskal dapat dipisahkan menjadi dua kategori yaitu kebijakan *fiskal stabilisator* dan *diskrit*.

Kebijakan fiskal penstabil otomatis atau disebut juga *stabilisator* terpasang menurut Lipsey (1990) adalah berbagai kebijakan yang dapat menurunkan kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan nasional, sehingga mengurangi angka multiplier. Penstabil otomatis mengurangi besarnya fluktuasi pendapatan nasional yang disebabkan oleh perubahan-perubahan *autonomous* pada pengeluaran-pengeluaran seperti investasi. Selain itu, perangkat ini akan bekerja tanpa pemerintah harus bereaksi dengan sengaja, terhadap setiap perubahan pendapatan nasional pada waktu perubahan ini terjadi. Tiga bentuk penstabil otomatis yang utama adalah pajak, pengeluaran pemerintah dan transfer pemerintah.

Pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah cenderung relatif stabil dalam menghadapi variasi pendapatan nasional yang bersifat siklis. Banyak pengeluaran sudah disetujui oleh peraturan sebelumnya, sehingga hanya sebagian kecil saja yang dapat dirubah oleh pemerintah. Perubahan kecil tersebut dilakukan dengan sangat lambat. Sebaliknya, konsumsi dan pengeluaran swasta untuk investasi cenderung bervariasi sejalan dengan pendapatan nasional. Semakin besar peran pengeluaran pemerintah dalam suatu perekonomian, makin kecil kadar ketidak-stabilan siklis pada seluruh pengeluaran. Meningkatnya peran pemerintah dalam perekonomian dapat saja merugikan atau menguntungkan. Meskipun demikian, pengeluaran pemerintah merupakan penstabil otomatis yang ampuh dalam perekonomian.

Kebijakan fiskal yang kedua adalah kebijakan fiskal *diskresioner*, yaitu memberlakukan perubahan pajak dan pengeluaran yang dirancang untuk mengimbangi senjang yang timbul. Agar dapat melakukannya secara efektif, pemerintah secara periodik harus mengambil keputusan untuk merubah kebijakan fiskal. Dalam proses mempertimbangkan kebijakan fiskal diskresioner, perlu dipertimbangkan dua hal, yaitu kemudahan kebijakan fiskal untuk dirubah dan pandangan rumah tangga dan perusahaan atas kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat sementara atau jangka panjang.

Stabilitas perekonomian dapat dicapai apabila pemerintah mampu melaksanakan kebijakan fiskalnya dengan baik. Artinya pemerintah hanya mampu memelihara angkatan kerja tinggi (pengangguran rendah), tingkat harga yang stabil, tingkat suku bunga yang wajar, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Jika perekonomian stabil maka pendapatan masyarakat akan meningkat dan pengangguran menurun sehingga tercipta kesejahteraan sesuai dengan harapan masyarakat (Soediyono, 1992:92).

Desentralisasi di Indonesia dimulai pada Tahun 2001 dengan menerapkan UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang telah diperbaharui UU No 32 dan 33 Tahun 2004. Dengan demikian telah terjadi telah terjadi perubahan struktural, dimana pada era sebelumnya pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara sentralistik kemudian berubah menjadi desentralisasi. Tujuan umum dari perubahan tersebut adalah untuk membentuk dan membangun sistem publik yang dapat menyediakan barang dan jasa publik lokal yang semakin efektif dan efisien, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

Dengan dilaksanakannya desentralisasi maka pemerintah daerah mempunyai kebebasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan rencana-rencana pembangunan yang telah disetujui dalam APBD. Namun demikian setiap pemerintah daerah harus mampu mengkoordinasikan pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan agar dapat mengurangi masalah ketimpangan pembangunan wilayah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Bermula dari Teori Perubahan Struktur Ekonomi, menurut Fisher dan Kindleberger dalam Djohadikusumo pertumbuhan ekonomi biasanya disertai dengan pergeseran permintaan barang dari sektor primer ke sektor sekunder. Pendapat ini kemudian didukung oleh Clark dengan

penelitian menggunakan data *cross sectional* beberapa negara. Clark menyusun struktur kesempatan kerja produksi dan tingkat pendapatan nasional per kapita. Hasilnya adalah semakin tinggi tingkat pendapatan nasional perkapita suatu negara, makin kecil peranan sektor primer dalam menyediakan kesempatan kerja (Djojohadikusumo, 1994).

Sejalan dengan Clark penelitian yang dilakukan oleh Chenery dan Taylor (1975) dalam Sukirno, memperlihatkan corak perubahan struktur ekonomi menggunakan data dari berbagai negara dalam kurun waktu tertentu, dalam analisisnya proses perubahan struktur ekonomi ada hubungannya antara pendapatan perkapita dengan persentase sumbangan berbagai sektor ekonomi pada produksi nasional (Sukirno, 1995).

Chenery dalam penjelasannya mengungkapkan salah satu faktor terjadinya penyebab pergeseran sektor primer ke sektor sekunder dan berimbas pada terjadinya perbedaan pendapatan perkapita antara daerah satu dengan yang lain adalah dikarenakan keuntungan berbanding (*Comparative Advantage*) yang dimiliki tiap negara atau daerah yang berbeda-beda. Negara atau daerah yang memiliki keunggulan dalam sektor primer akan memproduksi barang primer dan mengimpor barang sekunder, sedangkan negara atau daerah yang memiliki keunggulan dalam sektor sekunder akan memproduksi barang sekunder dan mengimpor barang primer. Kemudian dengan sifat alami manusia yang apabila terjadi peningkatan pendapatan maka proporsi pembelian barang primer akan menurun dan proporsi pembelian barang sekunder akan meningkat, hal ini mengakibatkan perbedaan pendapatan perkapita antar daerah yang semakin meningkat.

Kesimpulannya berdasarkan uraian diatas adalah bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, salah satu dari tujuan Desentralisasi adalah mengoreksi *horizontal imbalance*, yaitu memperkecil disparitas antar daerah dengan mekanisme *block grant*/transfer dan memperbesar kewenangan daerah untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki.

Dengan diberlakukannya desentralisasi maka daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan pengeluaran pemerintah daerah yang ada dalam APBD. Sesuai dengan peran pemerintah dalam perekonomian, pemerintah memiliki peran stabilisasi, peran alokasi, peran distribusi, dan peran dinamisasi, maka pengeluaran pemerintah daerah harus dilandaskan pada peran-peran tersebut.

Seperti yang diutarakan oleh Sjafrizal, bahwa dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dapat dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang baru di daerah yang berskala kecil, dan kebijakan fiskal wilayah yang mendukung penyelesaian masalah ketimpangan. maka dalam upaya penyelesaian masalah ketimpangan tersebut diperlukan pengeluaran pemerintah daerah yang sudah terkoordinir yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang berskala kecil

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ketimpangan pembangunan wilayah di penelitian ini diukur dari Pengeluaran Pemerintah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan populasi dan sampel 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur tahun 2007-2011. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM) dengan model seperti berikut:

$$\text{Ketim}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Peng}_{it} + \beta_2 \text{Pert}_{it} + \mu_{it}$$

dimana:

Ketim_{it} = ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson) pada kabupaten/kota i pada tahun t

Peng_{it} = pengeluaran Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota i pada tahun t

Pert_{it} = pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota i pada tahun t

- α = konstanta
- $\beta_{1,2}$ = koefisien regresi
- μ_{it} = error term

Untuk menghindari perbedaan pengertian dan memberikan batasan yang tegas pada variabel yang diteliti, maka definisi operasional terhadap masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Realisasi Belanja Daerah atas dasar harga yang berlaku dalam APBD di seluruh kabupaten dan kota dalam Propinsi Jawa Timur.
2. Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat dari perubahan indikator ekonomi makro yaitu perubahan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga yang berlaku di seluruh kabupaten dan kota dalam wilayah Propinsi Jawa Timur dengan satuan persentase.
3. Ketimpangan Pembangunan Wilayah dalam penelitian ini diukur sesuai dengan menggunakan metode pengukuran Indeks Williamson (*Williamson Index*). *Williamson Index* menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga yang berlaku sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah. Dengan demikian formulasi Indeks Williamson ini secara statistik dapat ditampilkan sebagai berikut :

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}{y}} \quad 0 < V_w < 1$$

- dimana
- y_i = PDRB perkapita daerah i
 - y = PDRB perkapita rata-rata seluruh daerah
 - f_i = Jumlah Penduduk daerah i
 - n = Jumlah Penduduk seluruh daerah.

subskrip w digunakan karena formulasi yang digunakan adalah secara tertimbang sehingga indeks tersebut dapat dibandingkan dengan negara atau daerah lainnya. Sedangkan pengertian indeks ini adalah sebagai berikut : bila V_w mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila V_w mendekati nol berarti sangat merata (Sjafrizal 2008).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Pendekatan/Metode Regresi Data Panel

Untuk menentukan pendekatan/metode dalam estimasi regresi data panel, prosedur yang harus dilakukan dalam estimasi regresi data panel adalah: (1) uji CHOW untuk memilih antara pendekatan *Pooled Least Square* (PLS) dan *Fixed Effect Model* (FEM); (2) uji Haussman untuk memilih antara pendekatan FEM dan *Random Effet Model* (REM).

1. Uji CHOW

Uji CHOW digunakan untuk memilih metode yang paling sesuai antara *pooled least square* (PLS) dan *fixed effect* (FEM). Hipotesis yang diajukan untuk uji CHOW adalah:

- H_0 : model PLS
- H_1 : model FEM

Hasil uji CHOW ditunjukkan oleh Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 : Hasil Uji CHOW

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: FIXED			
Test cross-section and period fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4283.454791	(37,146)	0.0000
Cross-section Chi-square	1328.241974	37	0.0000
Period F	1.271437	(4,146)	0.2839
Period Chi-square	6.505773	4	0.1644
Cross-Section/Period F	3899.827800	(41,146)	0.0000
Cross-Section/Period Chi-square	1329.917505	41	0.0000

Sumber : Output Eviews

Dari uji *Redundant Fixed Effect – Likelihood Ratio* nilai dari *F*-hitung pada *Cross-Section/Period* adalah 3899.827800 dan tingkat derajat kebebasan 41,146. Sedangkan nilai *F*-tabel pada tingkat derajat kebebasan yang sama dan tingkat $\alpha=0,05$ adalah 251.1432, sehingga kesimpulannya *F*-hitung lebih besar dari pada *F*-tabel maka hipotesa nol ditolak dan model yang dipilih berdasarkan hasil dari uji Chow adalah *Fixed Effect Model*.

2. Uji Haussman

Uji Haussman dilakukan untuk menentukan model yang paling baik antara FEM dan REM. Hipotesis yang diajukan untuk uji Hausman adalah:

H_0 : model REM

H_1 : model FEM

pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai probabilitas *cross-section random*, di mana pada tingkat $\alpha = 0,05$, H_0 ditolak apabila nilai probabilitas *cross-section random* lebih kecil dari 0,05. Hasil uji Hausman disajikan dalam Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 : Hasil Uji Haussman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: REM			
Test cross-section and period random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	2	1.0000
Period random	5.180954	2	0.0750
Cross-section and period random	5.600402	2	0.0608

Sumber : Output Eviews

Dari hasil uji Hausman seperti pada Tabel 5, terlihat bahwa nilai probabilitas *cross-section and period random* adalah 0,0608, artinya nilai probabilitas ini lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 diterima. Dengan kata lain, metode yang paling baik untuk estimasi data panel dalam penelitian ini berdasarkan uji Hausman adalah *Random Effect Model* (REM).

Hasil Estimasi *Random Effect Model*

Hasil estimasi menggunakan metode *random effect model* (REM) ditunjukkan oleh Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 : **Estimasi dengan Metode REM**

Dependent Variable: KETIM?				
Method: Pooled EGLS (Two-way random effects)				
Date: 06/24/13 Time: 10:50				
Sample: 2007 2011				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 38				
Total pool (balanced) observations: 190				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.092397	0.022547	4.097997	0.0001
PENG?	-2.26E-15	8.95E-16	-2.529321	0.0123
PERT?	0.001898	0.000643	2.953407	0.0035
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.133102	0.9987
Period random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			0.004740	0.0013
Weighted Statistics				
R-squared	0.063126	Mean dependent var	0.001623	
Adjusted R-squared	0.053106	S.D. dependent var	0.005013	
S.E. of regression	0.004878	Sum squared resid	0.004449	
F-statistic	6.299958	Durbin-Watson stat	0.657484	
Prob(F-statistic)	0.002250			

Sumber : Output Eviews

Berdasarkan output estimasi regresi data panel dengan metode REM di atas, maka hasil estimasi tersebut dapat diringkas sebagaimana Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5 : **Ringkasan Hasil Regresi Data Panel Metode REM**

<i>Variabel</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistik</i>	<i>Prob</i>
<i>C</i>	<i>0,092397</i>	<i>4,097997</i>	<i>0,0001</i>
<i>PENG</i>	<i>(2,26E-15)</i>	<i>(2,529321)</i>	<i>0,0123</i>
<i>PERT</i>	<i>0,001898</i>	<i>2,953407</i>	<i>0,0035</i>
<i>Prob (F-statistic)</i>	<i>0.002250</i>		

Sumber : Output Eviews (diolah)

Dari tabel 5 di atas maka persamaan regresi yang tercipta adalah:

$$Ketim_{it} = 0.092397 - 2.26E^{-15} (Peng_{it}) + 0.001898 (Pert_{it}) + \mu_{it}$$

Sementara itu, efek individual masing-masing kabupaten dan kota tercermin dari nilai intersep akhir (C+Ci) masing-masing kabupaten dan kota. Tabel 6 menunjukkan nilai konstanta masing-masing kabupaten kota yang telah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil.

Tabel 6 : Efek Individual (C+Ci) Kabupaten dan Kota

No	Kab./Kota	C+Ci	No	Kab./Kota	C+Ci
1	Kota Kediri	0.741817	20	Kab. Jombang	0.071367
2	Kota Surabaya	0.665329	21	Kab. Trenggalek	0.070661
3	Kab. Jember	0.114651	22	Kab. Bondowoso	0.068557
4	Kota Malang	0.099971	23	Kab. Madiun	0.059156
5	Kab. Sampang	0.096131	24	Kab. Probolinggo	0.052732
6	Kab. Pasuruan	0.094617	25	Kab. Banyuwangi	0.052536
7	Kab. Pamekasan	0.093550	26	Kab. Lumajang	0.050417
8	Kab. Malang	0.092956	27	Kab. Magetan	0.048726
9	Kab. Kediri	0.092579	28	Kab. Situbondo	0.045249
10	Kab. Lamongan	0.086279	29	Kab. Tulungagung	0.027980
11	Kab. Bangkalan	0.085077	30	Kab. Tuban	0.025514
12	Kab. Ponorogo	0.082377	31	Kab. Bojonegoro	0.025113
13	Kab. Sidoarjo	0.081262	32	Kab. Mojokerto	0.017328
14	Kab. Ngawi	0.078120	33	Kota Pasuruan	0.013824
15	Kab. Pacitan	0.075630	34	Kota Madiun	0.012406
16	Kab. Sumenep	0.074949	35	Kota Blitar	0.005676
17	Kab. Blitar	0.074175	36	Kota Batu	0.001719
18	Kab. Gresik	0.073556	37	Kota Mojokerto	-0.005155
19	Kab. Nganjuk	0.071679	38	Kota Probolinggo	-0.007423

Sumber : Output Eviews (diolah)

Dengan melihat nilai t-statistic dan probabilitas masing-masing variabel pada Tabel 5, dan dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah. Nilai koefisien variabel sebesar $-2.26E^{-15}$, di mana tanda minus (-) menandakan adanya hubungan negatif, Kenaikan sebanyak satu triliun rupiah Pengeluaran Pemerintah mengakibatkan penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah sebanyak 0,00226 satu satuan indeks.
- Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah. nilai koefisien variabel sebesar 0,001898 menunjukkan adanya hubungan positif yang berarti bahwa jika Kenaikan sebanyak satu persen Pertumbuhan Ekonomi mengakibatkan kenaikan Ketimpangan Pembangunan Wilayah sebanyak 0,001898 satu satuan indeks..

Berdasarkan koefisien yang diperoleh dari penelitian ini pada variabel Pengeluaran Pemerintah adalah $-2.26E^{-15}$, hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya Pengeluaran Pemerintah akan semakin mengurangi nilai Indeks Williamson yang berarti semakin meratanya pembangunan. Keadaan ini mengindikasikan bahwa walaupun Pengeluaran Pemerintah sangat kecil dibandingkan dengan PDRB, tetapi Pengeluaran Pemerintah telah diprogramkan/digunakan dalam mengatasi masalah Ketimpangan Pembangunan Wilayah. Namun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi masalah Ketimpangan Pembangunan Wilayah masih kurang efektif terlihat dari nilai koefisien yang terlalu kecil.

Ketidakefektifan dari pengeluaran pemerintah dikarenakan masih banyaknya belanja-belanja pemerintah yang dinilai tidak terlalu penting, seperti belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas. Belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas hanya dapat menambah penghasilan dari pegawai pemerintahan. Belanja pegawai terdiri dari pembayaran gaji dan pembayaran honor kegiatan-kegiatan yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil, seharusnya kegiatan-kegiatan tersebut sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari unit yang melaksanakan kegiatan tersebut sehingga tidak perlu dibuatkan Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran tentang pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan negara harus membayarkan honor atas kegiatan tersebut. Belanja

Perjalanan dinas kebanyakan hanya digunakan untuk keperluan yang kurang penting seperti rapat dan kegiatan yang dilaksanakan di luar kantor, meskipun rapat dan kegiatan tersebut sebenarnya dapat dilakukan di dalam kantor.

Penjelasan lain berdasarkan data yang diperoleh bahwa nilai koefisien pengeluaran pemerintah yang kecil dikarenakan pada daerah dengan tingkat ketimpangan yang tinggi, perbandingan pengeluaran pemerintah dengan PDRB sangat kecil bahkan sampai 1%, ini dikarenakan perekonomian daerah tersebut sudah digerakkan secara otomatis dari sektor swasta. Sedangkan pada daerah yang tergolong tingkat ketimpangan pembangunan yang rendah sektor swasta belum mampu menggerakkan perekonomian yang menyebabkan pengeluaran pemerintah tinggi.

Pada variabel Pertumbuhan Ekonomi nilai koefisien menunjukkan adalah sebesar 0,001898 hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkatkan juga nilai Indeks Williamson yang artinya akan semakin memperburuk Ketimpangan Pembangunan Wilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa di daerah dengan pertumbuhan yang tinggi telah terjadi ketimpangan pembangunan yang juga tinggi, dan sesuai dengan fakta yang terjadi di kebanyakan negara.

Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan Myrdal (1976) efek *backwash* adalah suatu efek ketika daerah yang mengalami kemajuan akan semakin maju dan daerah yang mengalami ketertinggalan akan semakin tertinggal, hal ini karena perbedaan dari modal, tenaga kerja, keterampilan, teknologi, dan fasilitas publik yang berbeda pada tiap-tiap daerah. Dari segi modal, modal yang tersedia di daerah yang maju pasti lebih banyak karena dengan perkembangan ekonomi yang pesat jelas terdapat perputaran uang yang tinggi pula sehingga meningkatkan pendapatan dari masyarakat di daerah tersebut. Sesuai dengan hukum ekonomi bahwa peningkatan pendapatan akan dapat meningkatkan konsumsi dan tabungan masyarakat, dan peningkatan tabungan masyarakat menjadi penyebab dari tersedianya modal yang besar di daerah tersebut. Pada daerah yang tertinggal dengan ekonomi yang lesu maka pendapatan masyarakat akan kecil sehingga tabungan masyarakat juga kecil yang mengakibatkan jumlah modal yang tersedia juga kecil, bahkan tidak menutup kemungkinan modal yang sedikit tersebut akan dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi yang ada di daerah maju.

Dari segi tenaga kerja, perbedaan tingkat upah daerah maju dengan daerah tertinggal secara otomatis akan menimbulkan perpindahan tenaga kerja dari daerah tertinggal menuju ke daerah maju guna mencari pendapatan yang lebih tinggi, dengan demikian daerah yang tertinggal akan kehilangan tenaga kerjanya. Hal ini terbukti dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh banyak daerah maju guna membendung arus urbanisasi tidak berhasil. Dari segi keterampilan dan teknologi, pada daerah maju dengan begitu tinggi tingkat persaingan yang terjadi mendorong masyarakat di daerah tersebut untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan teknologi yang akan mendukung kegiatan ekonomi pelaku usaha sehingga akan lebih unggul dibandingkan dengan pelaku usaha yang lain, kemudian pelaku usaha yang tertinggal secara otomatis tidak ingin kalah dalam persaingan sehingga mencari cara agar dapat meningkatkan keterampilan dan teknologinya, dan kondisi ini berlangsung terus menerus. Sedangkan pada daerah yang tertinggal akan berlangsung kondisi yang stagnasi, dengan pola pikir yang tidak mau menerima perubahan bukan tidak mungkin daerah tersebut akan mengalami kemunduran.

Dari segi fasilitas publik, fasilitas publik yang dimaksud seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas jalan, fasilitas air, dll. Perbedaan fasilitas publik yang tersedia antara daerah maju dan tertinggal akan mengakibatkan perpindahan penduduk, tentunya masyarakat akan mencari tempat tinggal yang memiliki fasilitas publik yang lebih lengkap, selain itu dengan padatnya jumlah penduduk di daerah yang maju dan permintaan akan fasilitas publik tinggi dan jumlah dari penyediaan fasilitas publik oleh pemerintah yang tidak memadai maka kekurangan fasilitas publik tersebut akan menjadi kesempatan dari sektor swasta untuk menyediakannya tentu dengan pertimbangan ekonomi yang menguntungkan. Dengan kondisi demikian maka daerah maju akan semakin lengkap fasilitas publik, dan daerah yang tertinggal akan semakin berkurang penduduknya sehingga pemanfaatan fasilitas publik di daerah tersebut menjadi berkurang.

Selain itu faktor penyebab terjadinya pertumbuhan yang tinggi akan semakin membuat ketimpangan pembangunan wilayah juga semakin tinggi adalah terjadinya penyebab pergeseran sektor primer ke sektor sekunder dan berimbas pada terjadinya perbedaan pendapatan perkapita

antara daerah satu dengan yang lain adalah dikarenakan keuntungan berbanding (*Comparative Advantage*) yang dimiliki tiap negara atau daerah yang berbeda-beda. Negara atau daerah yang memiliki keunggulan dalam sektor primer akan memproduksi barang primer dan mengimpor barang sekunder, sedangkan negara atau daerah yang memiliki keunggulan dalam sektor sekunder akan memproduksi barang sekunder dan mengimpor barang primer. Kemudian dengan sifat alami manusia yang apabila terjadi peningkatan pendapatan maka proporsi pembelian barang primer akan menurun dan proporsi pembelian barang sekunder akan meningkat, hal ini mengakibatkan perbedaan pendapatan perkapita antar daerah yang semakin meningkat.

Nilai koefisien dari pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai koefisien dari pengeluaran pemerintah, hal ini mengakibatkan pengaruh dari pengeluaran pemerintah menjadi kurang optimal apabila dibandingkan dengan pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan. Koefisien pertumbuhan ekonomi yang positif menguatkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dengan menggunakan data *time series*.

Implikasi

Selanjutnya dijelaskan implikasi tentang kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan hasil dari regresi yang dilakukan dan teori yang mendasari penelitian ini.

Bertolak dari nilai koefisien yang negatif dan signifikan dari variabel pengeluaran pemerintah, maka pemerintah harus dapat lagi meningkatkan pengeluaran-pengeluarannya terutama yang ditujukan pada penyelesaian masalah ketimpangan pembangunan wilayah. Seperti yang diuraikan dalam teori bahwa seharusnya pengeluaran pemerintah dapat menjadi salah satu bentuk peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian.

Selanjutnya dari nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi yang positif dan signifikan maka berarti pola pertumbuhan yang tinggi belum menyentuh daerah-daerah yang relatif tertinggal. Hal ini berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi masih berada pada daerah yang sudah maju, maka daerah yang telah maju tersebut akan semakin maju dan daerah yang tertinggal akan semakin tertinggal.

Berkaitan dengan dua hasil tersebut maka salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah adalah membangun pusat pertumbuhan di daerah yang tertinggal. Pemerintah dalam membuat suatu daerah menjadi pusat pertumbuhan yang baru harus menyediakan antara lain :

1. Dalam daerah diharuskan ada suatu industri yang dapat mendorong perkembangan ekonomi sehingga dapat dijadikan industri induk. Industri induk adalah industri yang dapat menciptakan pertumbuhan industri-industri yang lainnya yang mendukung industri induk tersebut, sehingga tercipta suatu kebutuhan input dan output yang kuat antara industri-industri yang ada di daerah tersebut.

Dalam hal ini pemerintah dapat menyelenggarakan sosialisasi pada para pelaku usaha mengenai industri-industri unggulan yang akan dapat dijadikan industri induk dan industri-industri yang lain yang akan dijadikan pendukung/penopang dari industri induk, dan jaminan dari pemerintah untuk mendukung industri-industri tersebut.

Upaya mendukung dari pemerintah dapat dilakukan dengan memberikan keringanan pajak dan kemudahan perijinan.

2. Pemusatan kegiatan ekonomi yang baru pada suatu lokasi tertentu, sehingga dapat menjadi tujuan para pelaku ekonomi dalam melaksanakan kegiatannya.

Kelengkapan fasilitas publik yang kurang memadai juga menjadi salah satu penyebab perpindahan penduduk yang mencari daerah lain yang mempunyai fasilitas publik yang lebih lengkap, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dll. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan belanjanya yang membangun fasilitas-fasilitas publik tersebut di daerah yang relatif tertinggal.

Fasilitas publik seperti jalan juga sangat berperan penting dalam mobilitas faktor dan hasil produksi antar daerah. Kelancaran mobilitas faktor produksi sangat berpengaruh besar dalam

proses menghasilkan suatu produk. Sedangkan kelancaran mobilitas hasil produksi sangat berpengaruh dalam proses pemasarannya.

Efisiensi pengeluaran pemerintah dapat dilakukan dengan pengurangan yang belanja-belanja yang tidak terlalu penting, seperti pembayaran honor-honor kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari instansi pemerintah. Penghematan belanja perjalanan dinas juga dapat dilakukan dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa dilaksanakan di dalam kantor. Pengurangan belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas selanjutnya bisa dialihkan menjadi belanja modal yang membangun fasilitas-fasilitas publik.

Penyelenggaraan kegiatan perpindahan penduduk dari daerah yang maju menuju daerah yang relatif tertinggal atau transmigrasi. Masyarakat yang berasal dari daerah maju diharapkan dapat menularkan cara berpikir yang lebih baik kepada masyarakat di daerah yang relatif tertinggal. Perubahan cara berpikir dapat membuat kemajuan dalam perekonomian di daerah yang tertinggal. Penyelenggaraan program transmigrasi harus direncanakan dengan matang, pemilihan masyarakat yang akan menempati di daerah yang relatif tertinggal harus sesuai dengan karakteristik daerah yang ditinggalkan.

E. KESIMPULAN

Dari serangkaian pembahasan tentang ketimpangan pembangunan wilayah, peranan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan wilayah melalui pengeluaran pemerintah, dan pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah serta dilanjutkan dengan proses pengolahan data dengan metode kuantitatif, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi atau penyelesaian masalah ketimpangan pembangunan ekonomi adalah dua hal yang menjadi pilihan dari kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan.
2. Menurut Model Penyebab Berkumulatif (*Cumulative Causation Model*) dan Myrdal bahwa tanpa adanya campur tangan pemerintah maka daerah yang maju akan semakin maju dan daerah yang tertinggal akan semakin tertinggal, sehingga ketimpangan pembangunan akan semakin tinggi.
3. Sesuai fungsi alokasi dan distribusi yang dimiliki APBD maka seharusnya APBD diharuskan dapat mengalokasikan serta mendistribusikan seluruh sumber daya, kesempatan dan hasil ekonomi secara optimal dan adil. Oleh karena itu peran pemerintah dapat dilihat dari pengeluaran APBD.
4. Dari berbagai penelitian yang dilakukan di Propinsi Jawa Timur pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan namun dengan data *time series*, dalam penelitian ini menggunakan data panel yang kemungkinan dapat memberikan hasil yang berbeda.
5. Hasil dari regresi yang dilakukan dengan menggunakan *Random Effect Model* diperoleh nilai koefisien dari variabel pengeluaran pemerintah adalah negatif dan signifikan, sedangkan nilai koefisien dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga jurnal ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul R, dkk. 2011. *Cara Cerdas Menguasai EVIEWS*. Jakarta. Salemba Empat.
- Arsyad, Lincolin. 1988. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta. STIE-YKPN.

- Atems, B. 2012. The spatial dynamics of growth and inequality: Evidence using U.S. county-level data. *Economics Letters*. Vol.118: 19–22.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2006-2010*. Jakarta. BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2007-2011*. Jakarta. BPS.
- Bjørnskov, C. 2006. The growth–inequality association: Government ideology matters. *Journal of Development Economics*. Vol.87: 300–308.
- Davey, K. 1989. *Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, dalam Devas (editor), *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta. UI-Press.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta. LP3ES
- Gujarati, Damodar N dan Porter, Dawn C. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta. Salemba Empat.
- Guritno Mangkoesobroto, 1997, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta. BPFE.
- Harun, Mukaramah, dkk. 2012. Public expenditure expansion and inter-ethnic and rural-urban income disparity. *Procedia Economics and Finance*. Vol.1: 296 – 303.
- Lipsey, Richard G. 1992. *Pengantar Makro Ekonomi Edisi 8*. Jakarta: Erlangga
- Martin, P. 1998. Public policies, regional inequalities and growth. *Journal of Public Economics*. Vol.73: 85–105.
- Musgrave, Richard A.1993. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5*, Jakarta: Erlangga
- Myrdal, Gunnar. 1976. *Bangsa-Bangsa Kaya dan Miskin*. Jakarta. P.T. Gramedia.
- Nicholson ,Walter .2002.*Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya Edisi Delapan*. Jakarta: Erlangga
- Sianturi, Y.S. 2011. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Sidik, Machfud. 2002. *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional*. Jakarta.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang – Sumatera Barat: Baduose Media.
- Sudarmono, M. 2006. *Analisis Transformasi Struktural, Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Daerah Di Wilayah Pembangunan I Jateng*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 1995. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan)*. Jakarta. LPFE UI
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi 7. Jakarta. Erlangga.
- Zaman, K dan Khilji, B.A. 2012. The relationship between growth–inequality–poverty triangle and pro-poor growth policies in Pakistan: The twin disappointments. *Economic Modelling*. Vol.30: 375–393.